



KPK Sita Rp130 Juta di Rumah ALN

■ Dugaan Suap Proyek SAH di Yogyakarta



TRIBUN JOGJA/SUSILO WAHID NUGROHO

PENYIDIK KPK - Empat orang penyidik KPK berjalan dari Kantor DPUPKP menuju Kantor BLP Kota Yogyakarta, Kamis (22/8) malam. Tampak penyidik KPK membawa tiga koper dan satu kardus.

YOGYA, TRIBUN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) serta Kantor Badan Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kota Yogyakarta, Kamis (22/8).

Tak hanya di DPUPKP dan BLP. Ternyata KPK juga mengeledah rumah ALN, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Di rumah ALN, KPK menyita uang Rp130 juta. Pengeledahan tersebut terkait penanganan kasus



Langkah-langkah yang kami tempuh di antaranya adalah mengirim surat pemberhentian sementara dengan tidak hormat.

Erbagtyo Rohan
Kepala Kejati DIY

● ke halaman 7

KPK Sita Rp130 Juta di Rumah

• Sambungan Hal 1

dugaan suap proyek rehabilitasi saluran air hujan (SAH) di Jalan Prof. Dr. Soepomo Yogyakarta.

"Di Yogyakarta kemarin, di rumah saksi Kabid SDA Dinas PUPKP Yogyakarta, dari lokasi ini kami menyita uang sekitar Rp130 juta. Uang ini kami duga masih terkait proyek yang ada di dinas tersebut, dan ada dokumen dan barang bukti elektronik yang kami sita juga," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/8).

Perlu diketahui, penggeledahan dilakukan KPK di sejumlah lokasi di Yogyakarta dan Solo pada Rabu (21/8) dan Kamis (22/8). Menurut Febri, penyidik KPK akan mengklarifikasi temuan tersebut dalam proses pemeriksaan saksi perkara ini. "Nanti kami dalam secara spesifik dalam proses pemeriksaan saksi," kata dia.

Di Solo, KPK menggeledah Kantor PT Kusuma Chandra dan Kantor PT Mataram Mandiri. Penyidik menyita dokumen-dokumen terkait proyek yang ditangani dua perusahaan tersebut. Pada Kamis kemarin, KPK menggeledah Kantor DPUPKP dan BLP Kota Yogyakarta. Tim penyidik juga menyita dokumen-dokumen terkait proyek.

Pantauan reporter *Tribun Jogja*, saat penggeledahan, Kantor DPUPKP Kota Yogyakarta dijaga ketat polisi. Sediaknya ada empat petugas kepolisian dari Polda DIY di lantai dasar. Akses masuk pun dibatasi. Tampak pintu menuju lantai atas ditutup dan tidak bisa dilalui oleh sembarang orang.

Reporter *Tribun Jogja* mencoba meminta izin untuk melihat ruangan yang dilabeli stiker KPK di ruang kerja Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPKP yang berada di lantai 3. "Nggak bisa mbak," jawab seorang petugas polisi yang enggan disebut namanya, yang berjaga di *front office*.

Seorang petugas kepolisian hanya menjawab singkat ketika ditanya apakah ada kegiatan di ruang yang masih disegel tersebut. "Iya," jawabnya singkat. Namun, ketika disinggung mengenai keberadaan KPK yang sedang melakukan penggeledahan di ruang tersebut, petugas kepolisian tersebut eggan menjawab. "Kami tidak bisa memberikan keterangan. Kami disuruh berjaga di sini," bebernya.

Informasi yang dihimpun reporter *Tribun Jogja*, ada sekitar 10 penyidik KPK yang melakukan penggeledahan. Penyidik KPK datang menggunakan empat mobil sekitar pukul 10.00.

Sekitar pukul 14.35, penyidik KPK keluar dari kantor DPUPKP menuju ke kantor BLP Kota Yogyakarta. Tak berhenti di situ, sekitar pukul 15.50, empat petugas keluar dari BLP Kota Yogyakarta kembali ke DPUPKP Kota Yogyakarta.

Penyelidikan yang dilakukan KPK sangat tertutup. Sekitar pukul 18.00, empat penyidik KPK keluar dari kantor DPUPKP Kota Yogyakarta membawa tiga koper. Satu koper warna ungu ukuran besar, satu

warna silver ukuran besar, dan satu koper warna hitam ukuran lebih kecil. Selain membawa koper, penyidik juga menggendong tas hitam dan membawa kardus warna cokelat. Mereka membawa koper tersebut ke BLP Kota Yogyakarta.

Tak berapa lama kemudian, ada dua penyidik KPK menyusul. Seorang di antaranya membawa keresek warna putih.

Sekitar pukul 19.55, satu per satu penyidik KPK keluar dari BLP Kota Yogyakarta didampingi polisi menuju mobil-

Ada sosok BAS

Selain petugas KPK, tampak sosok BAS, ASN Pemkot Yogyakarta yang sempat diamankan dalam rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Status BAS masih sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek SAH tersebut.

BAS merupakan anggota Badan Layanan Pengadaan sekaligus anggota Pokja LeLang Pengadaan Rehabilitasi SAH Jalan Prof. Dr. Soepomo. Kemarin, BAS mendampingi penyidik KPK saat menggeledah kantor DPUP-KP dan BLP.

Perlu diketahui, ada dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sempat diamankan KPK, dan statusnya sebagai saksi. Selain BAS, ada ALN, Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.

Pada rangkaian OTT, KPK mengamankan 5 orang. Selain dua ASN Pemkot Yogyakarta, KPK mengamankan GYA, Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri (Mairan); NVA, Direktur PT. Manira Arta Mandiri; ESF, jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, anggota TP4D.

KPK pun sudah menetapkan tiga tersangka. Antara lain, GYA, ESF (jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta). GYA selaku pemberi suap, sedangkan ESF dan SSL selaku penerima suap.

Dugaan uang suap yang sudah diserahterimkan kepada ESF dan SSL sekitar Rp221 juta, atau sekitar 3 persen dari 5 persen kesepakatan komitmen fee. Ratusan juta rupiah tersebut diberikan dalam tiga tahap, yakni pada 16 April 2019 diberikan sebesar Rp10 juta. Pada 15 Juni 2019, sebesar Rp100.870.000. Pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp110.870.000. Sedangkan sisa fee 2 persen, direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat Agustus 2019.

Persilakan KPK

Dihubungi melalui sambungan telepon, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, yang sedang berada di Stadion Mandala Krida mengaku tidak tahu terkait kedatangan KPK di Kompleks Balai Kota Yogyakarta.

Meski demikian, orang nomor satu di Kota Yogyakarta tersebut mempersilakan KPK untuk melakukan pekerjaannya. "Saya tidak tahu, monggo saja sesuai ketugasan kok," urainya.

Pemberhentian sementara

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY telah mengirimkan permohonan untuk pemberhentian sementara kepada oknum jaksa Tim Pengawal, Pengaman

Daerah (TP4D), ESF yang menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap proyek SAH di Yogyakarta.

Kepala Kejati (Kajati) DIY, Erbagtyo Rohan, menyebut prihatin atas kejadian OTT ini, dan meminta maaf pada Sultan Hamengku Buwono X serta masyarakat DIY atas kejadian ini.

"Langkah-langkah yang kami tempuh di antaranya adalah mengirimkan surat pemberhentian sementara dengan tidak dengan hormat. Kami masih menunggu proses kekuatan hukum tetap," ujarnya.

Dia, menjelaskan, untuk proses hukum ini, nantinya menunggu kekuatan hukum tetap dan untuk lamanya juga tergantung pada proses. Dikatakan, telah dilakukan pemeriksaan internal sesuai ketentuan berlaku.

"Kami sudah melangkah dan melaksanakan ketugasan sesuai SOP. Kami ingatkan teman-teman jaksa lain untuk bertugas sesuai aturan," jelasnya.

Dia, menjelaskan, dari pemeriksaan tidak ada masalah dengan instrumen TP4D. Hal ini merupakan murni dari perbuatan oknum jaksa tersebut.

"Kejadian OTT ini menimbulkan keprihatinan bersama dan mencederai instansi. Ini murni tindakan pribadi dan bukan kesalahan pada instrumen TP4D. Hal ini sudah kami klarifikasi dengan anggota lain," paparnya.

Sementara itu, pada saat MoU dengan Pemda DIY, Erbagtyo meminta maaf atas kesalahan oknum jaksa tersebut.

"Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur dan masyarakat Yogya atas sikap perbuatan seorang staf kami yang tercela. Kejadian ini membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Kami mohon maaf sebesar-besarnya," ulasnya.

Tak mengenal

Erbagtyo memaparkan, dirinya tak mengenal sosok jaksa ESF. Jaksa tersebut baru bertugas di Yogya Januari 2019. "Kalau (ke-lakuannya) biasa saja, tetapi saya belum tahu secara rinci tanyakan pada Kajatinya. Dia baru Januari lalu bertugas di DIY, sebelumnya dari Riau," urainya.

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menjelaskan, kejadian OTT KPK ini adalah penyakit satu oknum. Sultan menyebut tidak perlu adanya evaluasi pada TP4D. "Ini penyakit oknum. Evaluasinya untuk apa," katanya.

Menurutnya, sebelum kejadian ini semua pihak bisa berintrospeksi. "Dengan kejadian ini kami berharap ada introspeksi termasuk diri saya. Tugas pengawas ya ngawasi bukan diawasi. Kalau seperti itu tidak menyelesaikan masalah," jelasnya.

Untuk Pemkot Yogyakarta, diminta mengontrol kinerja ASN. Sementara, untuk pengawas juga harus benar-benar melakukan pengawasan. Dia mengatakan, penangan dan penegakan hukum harus benar-benar bagus. "Saya berharap ditangani dengan baik kalau ranah pidana ya pidana. Saya punya harapan jangan terjadi lagi. Ini untuk pertama dan terakhir," katanya. (kurimawalis.kompas.com)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Inspektorat 3. Dinas PUPKP 4. Bagian Layanan Pengadaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005